



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Penghulu RT. 05 RW. II Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Telp/Fax. (0518) 6070507 Laman : bpbd.tanahbumbukab.go.id

Pos-El : bpbd.tanahbumbukab@gmail.com Kode Pos 72271

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN
2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dapat tersusun.

Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub Kegiatan. Rancangan Awal Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin , Januari 2024

Kepala Pelaksana BPBD,



H. SULHADI, M.I.P

Pembinta Tk.I/IV.b

NIP. 19770503 200804 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
Bab II Hasil Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	14
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	31
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	39
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	41
Bab V Penutup.....	49

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	11
2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023.....	14
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	16
2.4	Review Terhadap Rancangan RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	24
2.5	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.....	30
3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.....	40
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renjas Badan Penanggulangan Bencana Daerah), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tugas dan Fungsi yang mendukung Visi, dan Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD yaitu Visi Bupati Tanah Bumbu yaitu **“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius, dan Demokratis”** dan Masuk dalam Misi ke 2 (dua) yaitu **“Mewujudkan Infastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian”**. BPBD masuk dalam Tujuan ke 1 (satu) dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Pembangunan Infastruktur Wilayah, dan masuk pada Sasaran ke 5 (lima) yaitu Menurunkan Risiko Terjadinya Bencana dengan Indikator Indeks Risiko Bencana.

Selanjutnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan :5-33/2021), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rancangan awal rencana kerja tahunan bagi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan

dan sub kegiatan pada tahun 2025;

- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun 2022) dan Capaian Renstra PD (ambil di F10)

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun n-2/tahun 2022), perkiraan capaian tahun berjalan (n-1/2023) dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan realisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan Renja Tahun tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun yang lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan PD bersangkutan. masyarakat.

Pokok pokok yang di sajikan di Bab Ini :

- a. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan

- b. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan
- c. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan
- d. Faktor factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
- f. Kebijakan /Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu di sajikan pada Bab Ini adalah Tabel T-C.29

2.2 Analisis Kinerja pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam NSPK dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Tabel yang di pakai pada sub bab ini table T.C 30 (Download Permendagri 86)

2.3 Isu isu penting penyelenggaran tugas dan Fungsi

Sub Bab ini di sajikan

- a. Permasalahan dan hambatan PD
- b. Dampak terhadap pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah
- c. Tantangan dan Peluang PD

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2025

- a. Membandingkan antara rancangan awal RKPD 2025 dengan analisis kebutuhan
- b. Jelaskan bila ada perbedaan antara rancangan awal RKPD denga

C. Tabel yang perlu di sajikan pada Bab Ini adalah

Tabel T- C.31 (Permendagri 86)

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan

capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kualitas Rancangan Awal Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Rancangan Awal Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dan Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2025.

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rek						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Rensra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sd tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja BPBD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d Tahun 2024	
										Target Renja BPBD Tahun 2023	Realisasi Renja BPBD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0,00	20	5	0,00%	234	234	100%
1	05	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		0,00	1	1	0,00%	1	1	100%
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0,00	66	66	0,00%	1	1	100%
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%

							Umum Perangkat Daerah (%)								
1	05	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	1	1	0,00%	1	1	100%	
1	05	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	15	15	0,00%	18	18	100%	
1	05	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	12	12	0,00%	1	1	100%	
1	05	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	6	6	0,00%	4	4	100%	
1	05	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1	1	0,00%	1	1	100%	
1	05	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	1	1	0,00%	1	1	100%	
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1	1	0,00%	1	1	100%	
1	05	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	1	1	0,00%	1	1	100%	
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	25	25	0,00%	30	30	100%	
1	05	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	3	3	0,00%	2	2	100%	
1	05	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0,00	48	48	0,00%	69	69	100%	
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana (%)	3,00	0,00	3	-	0,00%	100,00	100,00	100%
							Persentase Penanggulangan Bencana (%)	100,00	0,00	100	-	0,00%			
1	05	03	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	03	2	01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	0,00	150	150	0,00%	22	22	100%	

							Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)								
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana (%)	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	03	2	02		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (Dokumen)		0,00	1	1	0,00%	1	1	100%
1	05	03	2	02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)		0,00	190	190	0,00%	10	10	100%
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang berhasil ditangani (%)	100,00	0,00	100	-	0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	03	2	03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)		0,00	1	-	0,00%	1	1	100%
1	05	03	2	03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)		0,00	37018	2	0,00%	35.100	35.100	100%
1	05	03	2	03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		0,00	37018	121	0,00%	35.100	35.100	100%
1	05	03	2	03		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100,00	0,00			0,00%	100,00	100,00	100%
1	05	03	2	03		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)		0,00	1	1	0,00%	1	1	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggara suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja di Kabupaten Tanah Bumbu, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Sampai dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						Realisasi	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,62	0,61
Sasaran : Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Angka Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,62	0,61

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana.”** memiliki indikator **“Indeks Ketahanan Daerah sebagai indikator kinerja”** yaitu dengan target “0,5” telah mencapai target dengan realisasi sebesar “0,61” atau dengan Rasio Capaian 122%;
- b. Sasaran **“Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Bencana”** memiliki indikator **“Angka Kapasitas Daerah terhadap Bencana”** yaitu dengan target “0,5” telah mencapai target dengan realisasi sebesar “0,61” atau dengan Rasio Capaian 122%;

Selain analisis pencapaian tujuan dan sasaran diatas pada bab ini juga disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel .2.3 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017													
	Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (jiwa)		√	36.946	37.018					2.777	126			
	Jumlah Korban Bencana dalam 1 (satu) tahun yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun (jiwa)		√	36.946	37.018					2.777	126			
II	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal													
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	√		1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	1.500	141.307	152.626	1.500	1.500	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	√		220	240	260	280	300	300	142.136	152.626	300	300	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	√		36.946	37.018	17.042	13.634	10.907	10.907	2.110	66.885	10.907	10.907	
III	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020													
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		√	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	1.500	2.861	152.626	1.500	1.500	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		√	220	240	260	280	300	300	367	152.626	300	300	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		√	26.629	21.304	17.042	13.634	10.907	10.907	29.116	66.885	10.907	10.907	
IV	RKPD Tahun 2024													
1	Jumlah Dokumen Kebencanaan yang dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana		√	1	1	4				2	2			
2	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti pelatihan Rawan Bencana dan atau Kesiapsiagaan		√	50	50	50				25	190			

3	Jumlah Personel TRC yang dikembangkan Teknis Manajerial		√		2	10				10	10			
4	Jumlah orang mendapatkan sosiliasi KIE		√	150	150	150								
5	Jumlah Penanganan Pasca Bencana		√	15	19	15				17	16			
6	Jumlah Penanganan Tanggap Darurat		√											
7	Jumlah Orang yang tersedia untuk melaksanakan sosiliasi KIE Raean Bencana lintas Kab/Kota		√	150	150	150				30	250			
8	Jumlah Aparatur terkait kebencanaan di Provinsi/Kab/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi kesiapsiagaan		√											
9	Jumlah Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat		√											

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

- a. Dari Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) untuk tahun 2023 dengan realisasi sebesar 126 jiwa ;
- b. Jumlah Korban Bencana dalam 1 (satu) tahun yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun (jiwa) tahun 2023 mencapai 126 jiwa.

II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana untuk tahun 2023 dengan realisasi sebesar 152.626 jiwa dari target 1.400 jiwa atau dengan kata lain jauh melebihi dari target yang ditetapkan;
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2023 dengan realisasi sebesar 152.626 jiwa dari target 260 jiwa atau dengan kata lain jauh melebihi dari target yang ditetapkan;
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2023 dengan realisasi sebesar 17.042 jiwa dari target 17.042 jiwa.

III. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana untuk tahun 2022 target nya 1.350 jiwa dengan realisasi sebanyak 2.861 jiwa sedangkan tahun 2023 di targetkan sebanyak 1.400 jiwa dengan realisasi 152.626 jiwa. Adapun terdapat peningkatan capaian melebihi target ini tidak lepas dari peran serta semua stakehoulder pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi kebencanaan terutama kondisi pra bencana.
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2022 di targetkan sebanyak 240 jiwa dengan realisasi 367 jiwa sedangkan untuk tahun 2023 target nya 260 jiwa dengan realisasi sebanyak 152.626 jiwa. Adapun terdapat peningkatan capaian melebihi target ini tidak lepas dari peran serta semua

stakeholder pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi kebencanaan terutama kondisi pra bencana.

- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tahun 2022 dengan target 21.303 jiwa dengan realisasi sebesar 29.116 jiwa sedangkan di tahun 2023 dengan target 17.042 jiwa realisasi sebesar 66.885 jiwa.

IV. RKPD Tahun 2024

- a. Jumlah Dokumen Kebencanaan yang dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana target tahun 2023 sebanyak 4 dokumen (Kajian Resiko Bencana, Rencana Kontijensi Banjir, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Karhutla) dengan realisasi sebanyak 2 dokumen yaitu dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Kontijensi Banjir;
- b. Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti pelatihan Rawan Bencana dan atau Kesiapsiagaan dengan target tahun 2023 sebanyak 50 orang dengan realisasi sebanyak 190 orang;
- c. Jumlah Personel TRC yang di kembangkan Teknis Managerial untuk tahun 2023 dengan target 10 orang dengan realisasi 12 orang;
- d. Jumlah orang mendapatkan sosialisasi KIE Rawan Bencana tahun 2023 dengan target 150 orang dan realisasi sebanyak 250 orang;
- e. Jumlah Penanganan Pasca Bencana dengan target 15 kejadian dan realisasi sebanyak 16 kejadian yang terdiri dari kejadian kebakaran pemukiman, pohon tumbang, angin puting beliung, dan rob/gelombang pasang sektor pemukiman;
- f. Jumlah Penanganan Tanggap Darurat untuk tahun 2023 tidak terealisasi karena tidak ada penetapan status tanggap darurat;
- g. Jumlah Orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE Rawan Bencana lintas Kab/Kota untuk tahun 2023 dengan target 150 orang dan realisasi sebanyak 250 orang;
- h. Jumlah Aparatur terkait kebencanaan di Provinsi/Kab/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi kesiapsiagaan untuk tahun 2023 dengan target sebanyak 50 orang dengan realisasi sebanyak 190 orang;

- i. Jumlah Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat untuk tahun 2023 tidak terealisasi karena tidak ada penetapan status tanggap darurat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan Kab. Tanah Bumbu tahun 2025 termasuk dalam Percepatan Kualitas Infastruktur.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah mencapai sasaran startegis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana dalam misi ke 2 (dua) yaitu “ Mewujudkan Infastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai coordinator, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana diantaranya :

- a. Belum dipahaminya bahwa focus Penanggulangan Bencana adalah Pencegahan atau Mitigasi berbasis pengurangan risiko bencana;
- b. Belum ada unsur pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai;
- d. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
- f. Belum adanya/lengkapya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Risiko Bencana;
- g. Terdapat 8 (delapan) Ancaman Bencana dengan Risiko sedang tinggi, Tingkat kerentanan terhadap ancaman Bencana masih tinggi, Tingkat kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana masih rendah, Belum dipahaminya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya oleh semua pihak yang berkepentingan;
- h. Masih kurangnya kelurahan/desa Tanggap Bencana dengan pendanaan APBD;
- i. Belum optimalnya Satgas/Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- j. Belum Optimalnya ketersediaan anggaran, personil, dan Kerjasama dengan stakeholder lain;
- k. Belum Maksimalnya tata kelola penanggulangan bencana;
- l. Kurangnya koordinasi lintas sector dalam penanggulangan bencana;
- m. Kurangnya intensitas informasi pelayanan bencana;
- n. Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih rendah.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- 2) Menetapkan standarisasi dan kemudahan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosuder tetap penanggulangan bencana;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penayluran uang dan barang;
- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan;
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Peluang

- 1) Kebijakan Nasional Pengarus utamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan;
- 2) Tersedianya Pusdiklat Kebencanaan BNPB;
- 3) Tersedianya Peraturan perundang-undangan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang

Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur wilayah yang mantap memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;

- b. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 .Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan , sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100	10.933.867.124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100	10.933.867.124	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100%	4.740.977.224	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100%	4.740.977.224	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Bumbu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Org/bln	3.898.871.154	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Bumbu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Org/bln	3.898.871.154	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	842.106.070	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	842.106.070	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanah Bumbu	Tertib administrasi dan disiplin pegawai perangkat daerah	100%	77.680.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanah Bumbu	Tertib administrasi dan disiplin pegawai perangkat daerah	100%	77.680.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	63 paket	77.680.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	63 paket	77.680.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.504.503.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.504.503.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	27.562.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	27.562.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	787.133.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	787.133.300	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	121.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	121.400.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	81.275.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah Bumbu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	81.275.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKBPBD	1 Laporan	422.133.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKBPBD	1 Laporan	422.133.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKBPBD	1 Dokumen	65.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKBPBD	1 Dokumen	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Bumbu	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	3.412.351.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Bumbu	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	3.412.351.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	387.245.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	387.245.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.025.106.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah Bumbu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.025.106.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	1.198.355.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	1.198.355.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	480.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Bumbu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	480.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	233.695.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	233.695.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DiRehabilitasi	3 Unit	250.965.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DiRehabilitasi	3 Unit	250.965.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	3 Unit	233.695.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	233.695.000	

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tanah Bumbu	Persentase Penanggulangan Bencana	100	9.995.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tanah Bumbu	Persentase Penanggulangan Bencana	100	9.995.000.000	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	1.650.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	1.650.000.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tanah Bumbu	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Org	900.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tanah Bumbu	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Org	900.000.000	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	750.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	750.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	100	5.095.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	100	5.095.000.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit	600.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit	600.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi	250 Orang	120.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi	250 Orang	120.000.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang	3 Kawasan	720.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan	3 Kawasan	720.000.000	

			memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana					strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	800.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	800.000.000	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	800.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	800.000.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dok	1.000.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dok	1.000.000.000	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	850.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	850.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Org	205.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Org	205.000.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tanah Bumbu	Presentase korban bencana yang berhasil ditangani	100	2.410.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Tanah Bumbu	Presentase korban bencana yang berhasil ditangani	100	2.410.000.000	

						Bencana					
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dok	810.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dok	810.000.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	35.100 Org	650.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	35.100 Org	650.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	35.100 Org	950.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	35.100 Org	950.000.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tanah Bumbu	Presentase Korban Bencana yang berhasil ditangani	100%	840.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tanah Bumbu	Presentase Korban Bencana yang berhasil ditangani	100%	840.000.000	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	840.000.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	840.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tanggung jawab dalam sifat Top Down.

Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2021 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Untuk tahun 2021 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 10 Fokus Pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
- 5. Infrastruktur**
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 5,8 – 6,5 %
 - b. Kontribusi BPBDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97 – 17,99%;
 - c. Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp.352,5.
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai

dengan pencapaian:

- a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan;
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39.
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap BPBDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang jalan tol baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh

6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
 - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan

pencapaian:

- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
- b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
- c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
- d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
- e. 900 Paten Domestik

10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
- b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
- c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
- d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
- e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
- f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
- g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
- h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 – 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105

8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %.

Kemudian pada tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, penyusunan dokumen RKBPBD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen RPJPBD tahun 2006-2025 dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2021 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu “**Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis**”. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Sedangkan rumusan tema pembangunan pada RKBPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah “**Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Untuk Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

1. **Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan

Pendidikan secara Luas;

- b. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan;
- c. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- d. Peningkatan Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- e. Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting;
- f. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
- g. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda;
- h. Peningkatan Sarana Dan Prasana Olahraga;
- i. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan;
- j. Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan; Peningkatan Akses, Perlindungan, Pemberdayaan dan Pelayanan Bagi Kelompok Disabilitas, dan Lansia;
- k. Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat.

2. **Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan;
- b. Peningkatan Produktifitas Pangan;
- c. Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi;
- d. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil;
- e. Peningkatan Kunjungan Wisatawan;
- f. Peningkatan Sarana dan Prasaran Tranportasi;
- g. Percepatan Penurunan Kemiskinan;
- h. Perlindungan PMKS;
- i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial;
- j. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

3. **Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan;
 - b. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru;
 - c. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh;
 - e. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman;
 - f. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi Layak;
 - g. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman;
 - h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir;
 - i. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana;
 - j. Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka;
 - k. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
4. **Pembangunan Masyarakat yang Agamis**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
 - b. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Perorangan/Kelompok;
 - c. Peningkatan Musyawarah Antar Umat Beragama;
 - d. Peningkatan Pembinaan Pasangan Usia Subur;
 - e. Pembangunan Rumah Tahfiz di setiap Desa.
5. **Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima;
 - c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah;

- d. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah;
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah;
- f. Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- g. Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa;
- h. Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Desa
- i. Mendukung Percepatan Penyederhaan Birokrasi.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Makro yang ditetapkan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024, antara lain meliputi :

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.72 – 0.78 %
- 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.02 – 5.88 %
- 3. Indeks Kesolehan Sosial 68.00 – 68.58
- 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71.91 – 72.15
- 5. Infrastruktur yang Mantap 52.06 – 56.98 %
- 6. Tingkat Kemiskinan sebesar 4.29 – 4.19 %
- 7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 76.15 – 76.83
- 8. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 60.69 – 60.91 (CC)
- 9. BPBDRB Sub Sektor Pertanian (ADHB) 1.64 – 2.50 %
- 10. BPBDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB) 3.56 – 3.72 %
- 11. BPBDRB Sub Sektor Perkebunan (ADHB) 1.06 – 2.24 %
- 12. BPBDRB Sub Sektor Peternakan (ADHB) 1.90 – 2.26 %
- 13. BPBDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) 0.36 – 5.84 %
- 14. Pertumbuhan Investasi 9.96 – 10.02 %

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian prioritas ke dua, yaitu “**Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan**”. Dengan Sasaran Prioritas yaitu:

- 1. Peningkatan Mitigasi Bencana;

Dengan memberikan desiminasi, sosialisasi dan melatih relawan serta mengedukasi masyarakat tentang kebencanaan.

2. Peningkatan Tanggap Darurat,

Guna menunjang peningkatan Tanggap Darurat dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan kebencanaan

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, yaitu : “Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana” dengan indikator tujuan **“Indek Ketahanan Daerah”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu **“Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana”**, dengan indikator sasaran “Angka Kapasitas Daerah terhadap Bencana”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,5
Sasaran : Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Angka Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks	0,5

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 serta Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Penanganan Kebencanaan” dan indikator sasaran “Menurunkan Risiko Bencana”;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Ranwal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1(satu) Program Penanggulangan Bencana;
2. Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 adalah sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, dan 27 (dua puluh juta) sub Kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebesar Rp.20.928.867.124,00, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian:
 - a. Rp 10.933.867.124.00,-untuk program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang (program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin).
 - b. Rp 9.995.000.000.00,- untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				20.928.867.124				21.217.867.054
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Tanah Bumbu	100	10.933.867.124	APBD		100	11.022.867.054
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	Tanah Bumbu	100%	4.740.977.224	APBD		100%	4.900.977.154
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tanah Bumbu	27 Org/bln	3.898.871.154	APBD		30 Org/bln	3.998.871.154
1 05 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanah Bumbu	1 Dok	842.106.070	APBD		1 Dok	902.106.000
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi dan disiplin pegawai perangkat daerah	Tanah Bumbu	100%	77.680.000	APBD		100%	78.680.000
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Tanah Bumbu	63 paket	77.680.000	APBD		63 paket	78.680.000
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanah Bumbu	100%	1.504.503.700	APBD		100%	912.503.700

1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Tanah Bumbu	1 Paket	27.562.400	APBD		1 Paket	29.562.400
1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tanah Bumbu	15 Paket	787.133.300	APBD		18 Paket	117.133.300
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tanah Bumbu	12 Paket	121.400.000	APBD		12 Paket	151.400.000
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tanah Bumbu	4 Paket	81.275.000	APBD		4 Paket	87.275.000
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKBPBD	Tanah Bumbu	1 Laporan	422.133.000	APBD		1 Laporan	452.133.000
1 05 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKBPBD	Tanah Bumbu	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	75.000.000
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Tanah Bumbu	100%	3.412.351.200	APBD		100%	3.752.351.200
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tanah Bumbu	1 Laporan	387.245.000	APBD		1 Laporan	427.245.000
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan umum Kantor yang Disediakan	Tanah Bumbu	1 Laporan	3.025.106.200	APBD		1 Laporan	3.325.106.200
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Tanah Bumbu	100%	1.198.355.000	APBD		100%	1.378.355.000
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya	Tanah Bumbu	30 Unit	480.000.000	APBD		35 Unit	530.000.000

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
1 05 01 209 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tanah Bumbu	80 Unit	233.695.000			95 Unit	283.695.000
1 05 01 209 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tanah Bumbu	3 Unit	250.965.000	APBD		4 Unit	280.965.000
1 05 01 209 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	Tanah Bumbu	3 Unit	233.695.000	APBD		3 Unit	283.695.000
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Tanah Bumbu	100	9.995.000.000	APBD		100	10.195.000.000
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Tanah Bumbu	100	1.650.000.000	APBD		100	1.800.000.000
1 05 03 201 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Tanah Bumbu	150 Org	900.000.000	APBD		150 Org	1.000.000.000
1 05 03 201 0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Tanah Bumbu	1 Dok	750.000.000	APBD		1 Dok	800.000.000
1 05 03 202	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	Tanah Bumbu	100	5.095.000.000	APBD		100	5.845.000.000

1 05 03 202 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Tanah Bumbu	50 Unit	600.000.000	APBD		50 Unit	650.000.000
1 05 03 202 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi	Tanah Bumbu	250 Orang	120.000.000	APBD		250 Orang	120.000.000
1 05 03 202 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Tanah Bumbu	3 Kawasan	720.000.000	APBD		3 Kawasan	750.000.000
1 05 03 202 0022	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Tanah Bumbu	1 Dok	800.000.000	APBD		1 Dok	850.000.000
1 05 03 202 0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Tanah Bumbu	1 Dok	800.000.000	APBD		1 Dok	850.000.000
1 05 03 202 0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Tanah Bumbu	1 Dok	1.000.000.000	APBD		1 Dok	1.500.000.000
1 05 03 202 0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Tanah Bumbu	1 Dok	850.000.000	APBD		1 Dok	900.000.000
1 05 03 202 0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Tanah Bumbu	50 Org	205.000.000	APBD		50 Org	225.000.000

1 05 03 203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase korban bencana yang berhasil ditangani	Tanah Bumbu	100	2.410.000.000	APBD		100	1.660.000.000
1 05 03 203 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Tanah Bumbu	1 Dok	810.000.000	APBD		1 Dok	860.000.000
1 05 03 203 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Tanah Bumbu	35.100 Org	650.000.000	APBD		35.100 Org	700.000.000
1 05 03 203 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tanah Bumbu	35.100 Org	950.000.000	APBD		35.100 Org	100.000.000
1 05 03 204	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Korban Bencana yang berhasil ditangani	Tanah Bumbu	100%	840.000.000	APBD		%	890.000.000
1 05 03 204 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Tanah Bumbu	1 Dok	840.000.000	APBD		1 Dok	890.000.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Penyusunan Rancanagn Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

2. berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Awal Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rancangan Awal Renja ini

juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2025.

Batulicin, Januari 2024

Kepala Pelaksana BPBD,



H. SULHADI, M.I.P

Pembinta Tk.I/IV.b

NIP. 19770503 200804 1 001